



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021**



**KABUPATEN SIAK**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, kebijakan. Program dan kegiatan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Siak Sri Indrapura,

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**



**SYAFRIZAL, S.Sos**  
**NIP. 19691202 199002 1 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Daftar tabel.....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**

2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	5
2.2. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	23

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	34
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri.....	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.....	42

#### **BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1	Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	41
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .....	44
4.3.	Strategi Dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .....	45

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR.**

5.1.	Rencana Program dan Kegiatan ,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	46
------	--	----

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**

6.1.	Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak .....	51
------	---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel II.3	Data Aparatur Berdasarkan Klarifikasi Struktural .....	13
Tabel II.4	Data Aparatur Berdasarkan Ruang dan Golongan .....	14
Tabel II.5	Data Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir .....	14
Tabel II.6	Data Aset yang Dikelola Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	15
Tabel II.7	Evaluasi dan Capaian Kinerja Pada Sub Bagian Tata Usaha.....	20
Tabel II.8	Evaluasi dan Capaian Kinerja Pada Seksi Kewaspadaan Daerah.....	21
Tabel II.9	Evaluasi dan Capaian Kinerja Pada Seksi Kesatuan Bangsa.....	22
Tabel II.10	Evaluasi dan Capaian Kinerja Pada Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik.....	23
Tabel II.11	Data Konflik Sara.....	24
Tabel II.12	Data Konflik Sosial.....	26
Tabel II.13	Data Unjuk Rasa di Kabupaten Siak.....	27
Tabel II.14	Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.....	28
Tabel II.15	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu dan Pemilukada.....	29
Tabel II.16	Arah Pengembangan Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan SKPD yang memuat VISI MISI, Tujuan, Strategi kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis mengacu kepada rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang memuat visi misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun Renstra SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Perda Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sudah beberap kali mengalami perubahan nomenklatur.

Sebelum era reformasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Siak dilaksanakan oleh Kantor Sosial Politik. Salah satu perubahan yang penting dari nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perubahan paradigma fungsi, yaitu fungsi pembinaan yang diemban oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada masa lalu menjadi fungsi pemberdayaan dan fasilitasi berbagai kegiatan sosial politik masyarakat, perwujudan kesatuan bangsa dan politik demi terwujudnya stabilitas kebudayaan masyarakat.

### **1.2. Landasan Hukum**

Adapun pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak :

- a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Tambahan (Lembaran Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten siak Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (RPJMD) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);
- k. Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 50):
- l. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- m. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra ini disusun sebagai acuan kerangka kerja dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak lima (5) tahun yang akan datang (2016 - 2021).

#### **A. Maksud**

Maksud dari penulisan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.

#### **B. Tujuan**

1. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak bertujuan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak bertujuan sebagai tolak ukur dan evaluasi hasil kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 5 tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.



### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau.
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kebijakan.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

##### **A. Tugas**

Berdasarkan Perda Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu :
  - Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Siak memiliki fungsi yaitu:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- d) Pelaksanaan urusan tata usaha kantor;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak terdiri dari :

- A. Kepala Kantor;
- B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- C. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa;
- D. Kepala Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik;
- E. Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah.



*Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak didukung oleh tenaga Administrasi dan teknis sesuai dengan keahlian masing masing yang diharapkan memberikan kontribusi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

## **1. Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak N0 52 Tahun 2012 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas berubah nomenklaturnya menjadi Kantor kesatuan bangsa dan politik. Sejak berdirinya kabupaten siak berdasrakan UU No 53 Tahun 1999 yang yang diresmikan Pada 12 Oktober 2000. Kantor kesatuan bangsa dan politik sudah beberapakali mengalami perubahan nomenklatur sebelum era reformasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Kantor Sosial Politik dan sebahagian lagi dikerjakan oleh Kantor Hansip.

Salah satu perubahan yang penting dari nomenklatur kantor kesatuan bangsa dan politik adalah perubahan paradigma fungsi, yaitu fungsi pembinaan yang demban oleh kantor kesatuan bangsa dan politik pada masa lalu menjadi fungsi pemberdayaan dan fasilitas berbagai kegiatan sosial politik masyarakat, perwujudan kesatuan bangsa dan politik demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

### **A. Kepala Kantor**

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan Kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. Pelaksanaan tata usaha kantor;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

## **B. Kasubbag Tata Usaha**

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor.
- 2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi;
  - a. Menyusun program dan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
  - c. Menerima, meneliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
  - d. Melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;
  - e. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - f. Mengelola urusan administrasi keuangan;
  - g. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
  - h. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan, program/kegiatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor.

## **C. Seksi Kesatuan Bangsa**

- 1) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur dan menyusun program kerja kesatuan bangsa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi kesatuan bangsa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun rencana dan program tugas;
  - c. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
  - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  - e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kesatuan bangsa;
  - f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksana pengelolaan Seksi Kesatuan Bangsa;
  - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Kesatuan bangsa;
  - h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor.

#### **D. Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik**

- 1) Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur dan menyusun program kerja kesatuan bangsa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Fasilitas Infrastruktur Politik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun rencana dan program tugas;
  - c. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
  - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  - e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan Fasilitas Infrastruktur Politik;

- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksana pengelolaan Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik;
  - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Fasilitas Infrastruktur Politik;
  - h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor.

#### **E. Seksi Kewaspadaan Daerah**

- 1) Seksi Kewaspadaan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur dan menyusun program kerja kesatuan bangsa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kewaspadaan Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun rencana dan program tugas;
  - c. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
  - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  - e. Melaksanakan koordinasi dan survisi pengembangan Kewaspadaan Daerah;
  - f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksana pengelolaan Seksi Kewaspadaan Daerah;
  - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Kewaspadaan Daerah;
  - h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- i. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Seksi Kewaspadaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor.

Dalam menunjang Seksi Kewaspadaan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membentuk forum – forum dan pola kerjanya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku adalah sebagai berikut:

#### **A. POLA KERJA KOMINDA**

##### **1. Rapat Koordinasi**

Rapat Koordinasi tentang permasalahan sosial, politik, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, baik yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi termasuk antisipasi gerakan terorisme, konflik horizontal dan kelompok radikal.

##### **2. Monitoring ke wilayah kecamatan**

Monitoring dilakukan dalam rangka mengetahui ada tidak potensi permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu dan mengancam stabilitas sospol dan kamtrantibmas di wilayah Kabupaten Siak. Apabila dijumpai potensi masalah, akan dibahas dalam rapat koordinasi untuk direkomendasikan kepada Bupati Siak, supaya Bupati Siak dapat mengambil kebijakan terhadap permasalahan yang akan atau yang telah terjadi.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan atau potensi masalah sospol dan kamtrantibmas telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan SK Bupati Siak Nomor 15/ KPTS/ 2011 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Siak. Di perbaharui dengan SK Bupati Nomor : 176/HK/KPTS/2014 Tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Keanggotaan FKDM Kabupaten Siak terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain-lain. FKDM yang dibentuk di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. FKDM Kabupaten Siak mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. Menjaring, menampung, mengordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini Masyarakat

## **B. POLA KERJA FKDM**

### **1. Rapat Koordinasi**

Rapat Koordinasi FKDM membahas potensi-potensi permasalahan kerawanan trantibmas dan penyakit masyarakat baik yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang maupun yang telah terjadi.

### **1. Monitoring kelapangan**

Monitoring dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui ada tidaknya potensi konflik yang disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam masyarakat, terutama potensi kerawan sosial politik (sospol), ketenteraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas).

## **C. POLA KERJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Pemerintah Kabupaten Siak Telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sejak tahun 2015 berdasarkan SK Bupati No 346/HK/KPTS/2015 Tentang pembentukan Tim Terpadu penanganan konflik sosial. Tim Terpadu Penanganan konflik sosila Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Siak;
- b. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik sosial dan upaya penanganannya;
- c. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- d. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; dan
- e. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

## 2.2. SUMBER DAYA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### A. Sumber Daya/Aparatur

Sumber daya organisasi menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. Sumber daya ini utamanya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk mendukung aktifitas organisasi. Perencanaan program harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya organisasi dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Beban kerja yang melebihi kemampuan dengan jumlah sumber daya yang kurang akan menjadi masalah bagi pencapaian target organisasi. Sebagaimana yang dijelaskan secara sekilas tentang sisi vital sumber daya organisasi, berikut ini akan disajikan pemetaan sumber daya manusia/aparatur organisasi yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan berbagai macam klasifikasi aparatur.

**Tabel II.3**  
**Data Aparatur Berdasarkan Klarifikasi Struktural**

N)	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Kantor	1
2	Kasubag Tata Usaha	1
3	Kepala Seksi	3
4	Staff	12
	<b>JUMALH</b>	<b>17</b>

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terserap dalam jabatan structural sebanyak 5 pegawai dan staff sebanyak 12 pegawai, hal ini mengakibatkan banyak rangkap tugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik karena terbatasnya personil.

**Tabel II.4**  
**Data Aparatur Berdasarkan Ruang dan Golongan**

NO	Golongan I dan Lain	Jumlah	Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah	Total
1	I/a	0	II/a	1	III/a	1	IV/a	0	
2	I/b	0	II/b	1	III/b	3	IV/b	1	
3	I/c	0	II/c	0	III/c	3	IV/c	0	
4	I/d	0	II/d	0	III/d	0	IV/d	0	
5	Honorer	7							
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>		<b>2</b>		<b>7</b>		<b>1</b>	<b>17</b>

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

Berdasarkan klarifikasi ruang dan golongan mayoritas pegawai golongan III adalah jumlah komposisi pegawai terbanyak yaitu 7 orang, dan terdapat pegawai yang belum memiliki status pegawai negeri atau berstatus honorer yaitu sebanyak 7 orang.

**Tabel II.5**  
**Data Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMA/SMK	6
2	S1	11
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

## B. Data Aset Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Setelah analisis mengenai sumber daya yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak selanjutnya adalah pemetaan aset yang berfungsi sebagai daya dukung operasional. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tentunya terikat dengan aspek humanisme yang motivasi kerja dan efektifitas kinerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja.

Pendayagunaan aset yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah upaya untuk mewujudkan motivasi kerja. Selain sebagai peningkatan kinerja aparatur, potensi asset berguna untuk pengembangan sarana yang mendukung fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, berikut ini adalah gambaran asset yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.

**Tabel II. 6**  
**Data Aset yang Dikelola**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ kontruksi (P,S,D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Nama/Jenis Barang	Merk/ Type			
4	5	9	10	12
<b>02.03 Alat-alat Angkutan</b>				
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain (BM 1357 S)	KIJANG INOVA / MINIBUS	2005	2000CC	B
Sepeda Motor (BM 3432 S)	HONDA / SUPRA X	2006	110 CC	B
Sepeda Motor (BM 3481 S)	HONDA / SUPRA X	2006	110 CC	B
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain (BM 29 S)	TOYOTA KIJANG INOVA / MINIBUS	2012	2000 CC	B
Sepeda Motor (BM 4061 S)	HONDA / REVO VIT	2013	110 CC	B
Sepeda Motor (BM 4060 S)	HONDA / REVO VIT	2013	110 CC	B
Sepeda Motor (BM 4059 S)	HONDA / REVO VIT	2013	110 CC	B
<b>02.06 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				
Filling Besi/Metal	Elite	2000	4 Laci	B

Meja Kerja Pejabat Eselon III	Olympic	2000	1 Biro	B
Lemari Besi	Lion	2001	2 Pintu	B
Filling Besi/Metal	Mustang	2001	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	Alba	2001	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	Lion	2001	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	Lion	2001	4 Laci	B
Overhead Projektor	Universal	2001	Sedang	B
Lemari Kayu	-	2001	2 Pintu	B
Lemari Kayu	-	2001	2 Pintu	B
Filling Besi/Metal	Mitsuwa	2002	4 Laci	B
Kursi Tamu	Asia Jaya	2002	-	B
AC Split	LG	2002	1 PK	B
Lemari Besi	-/-	2003	2 Pintu	B
Lemari Besi	-	2003	2 Pintu	B
Lemari Besi	-/-	2003	2 Pintu	B
Filling Besi/Metal	Alba	2003	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	Alba	2003	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	Alba	2003	4 Laci	B
Brand Kas	Uchida	2003	1 Pintu	B
Lemari Kaca	-	2003	2 Pintu	B
Lemari Kaca	-	2003	2 Pintu	B
Meja Kerja	Inovatif	2003	1 Biro	B
Meja Kerja	Inovatif	2003	1 Biro	B
Meja Kerja	lovatif	2003	1 Biro	B
Meja Kerja	lovatif	2003	1 Biro	B
Meja Kerja	lovatif	2003	1 Biro	B
Meja Kerja	lovatif	2003	1 Biro	B
Meja Rapat	-	2005	Sedang	B
Printer	HP	2005	Sedang	B
Meja Kerja	Suchida	2005	Standard	B
Lemari Kaca	VIP	2006	2 Pintu	B
Lemari Kaca	VIP	2006	2 Pintu	B
Lemari Kaca	VIP	2006	2 Pintu	B
Lap Top	Toshiba	2006	14 linchi	B
Printer	HP	2006	Standard	B
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Suchida	2007	14-16"	B
Lemari Besi	-/-	2007	-	B
Lemari Besi	-/-	2007	-	B
Lemari Besi	-/-	2007	-	B
Filling Besi/Metal	VIP	2007	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	VIP	2007	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	VIP	2007	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	VIP	2007	4 Laci	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B

Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
Kursi Putar	Fantoni	2007	Standard	B
P.C Unit/ Komputer PC	Acer	2007	14 Inchi	B
Lap Top	Acer	2007	14 Inchi	B
Printer	HP	2007	Standard	B
Lemari Besi	VIP	2008	2 Pintu	B
Filling Besi/Metal	VIP	2008	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	Yunika	2008	4 Laci	B
Lemari Kaca	Ligna	2008	2 Pintu	B
Lemari Kaca	Olympic	2008	2 Pintu	B
White Board	-/-	2008	-	B
White Board	-/-	2008	-	B
AC Split	Panasonic	2008	1 PK	B
Televisi	Polytron	2008	21 Inchi	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Suchida	2008	1 Biro	B
Meja Kerja	Image	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Meja Kerja	Olympic	2008	1/2 Biro	B
Mesin Listrik Standar	Brother	2009	14"-16"	B
Lemari Besi	Yunika	2009	1/2 Biro	B
Lemari Besi	Yunika	2009	1/2 Biro	B
Lemari Besi	Yunika	2009	1/2 Biro	B
Lemari Besi	Yunika	2009	1/2 Biro	B
Filling Besi/Metal	VIP	2009	4 Laci	B
Filling Besi/Metal	VIP	2009	4 Laci	B
Lemari Kaca	Expo	2009	2 Pintu	B
Lemari Kaca	Expo	2009	2 Pintu	B
White Board	-/ Besar	2009	-	B
White Board	-/ Besar	2009	-	B
Tempat Tidur Kayu (lengkap)	-/-	2009	Dua	B
Tempat Tidur Kayu (lengkap)	-/-	2009	Dua	B
Tempat Tidur Kayu (lengkap)	-	2009	Satu	B
Meja Makan	-	2009	Standard	B
Kursi Tamu	Jati	2009	Standard	B
Lemari Es	LG	2009	2 Pintu	B
AC Split	LG	2009	1 PK	B
AC Split	LG	2009	1 PK	B
AC Split	LG	2009	1 PK	B
Televisi	LG	2009	42 Inchi	B
Rak TV	LG	2009	42 Inchi	B
P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	2009	14 Inchi	B
Printer	Epson	2009	Standard	B
Meja Kerja	Expo	2009	1 Biro	B
Lemari Kaca	-/-	2010	2 Pintu	B

Lemari Kaca	-/-	2010	2 Pintu	B
Lemari Kaca	-/-	2010	2 Pintu	B
Lemari Kayu	Jati	2010	4 Pintu	B
AC Split	LG	2010	1 PK	B
AC Split	LG	2010	1 PK	B
Lap Top	Sony	2010	14 Inchi	B
Meja Kerja	-	2010	1 Biro	B
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2010	Standard	B
Lemari Besi	Yunika	2012	2 Pintu	B
Lemari Besi	Yunika	2012	2 Pintu	B
Rak Kayu	Big Panel	2012	Standard	B
Karpet	Councord	2012	2,50 x 3,30 cm	B
Karpet	Councord	2012	2,50 x 3,30 cm	B
Karpet	Biasa	2012	20M	B
Televisi	LG	2012	42 Inchi	B
Parabola Digital	Telkomvision	2012	9 Inchi	B
P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	2012	16 Inchi	B
Lap Top	Sony Vaio	2012	14 INCHI	B
Printer	HP Laserject 1102	2012	-	B
Printer	HP Laserject 1102	2012	-	B
Meja Rapat	Tempahan	2013	1,5 X 6 M	B
Lambang Garuda Pancasila	-	2013	-	B
P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	2013	14 Inchi	B
P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	2013	14 Inchi	B
Lap Top	Samsung	2013	14 Inchi	B
Lap Top	Samsung	2013	14 Inchi	B
Printer	Canon	2013	F4	B
Printer	Epson	2013	A3	B
<b>02.07 Alat-alat Studio dan Komunikasi</b>				
Proyektor + Attachment	Acer	2006	Standard	B
Handycam	Sony	2007	Sedang	B
Wireless Amplifier	Martin Roland	2008	16 Inchi	B
Camera Electronic	Canon	2013	58 mm	B

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

### 2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menurut definisinya kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas baik oleh individu maupun organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan. Kinerja juga sering disebut sebagai prestasi kerja yang merupakan penjabaran dan pencapaian output yang dinyatakan kualitas maupun kuantitas.

Hal ini berguna untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas. Pelayanan Publik (*public service*) yang diberikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak kepada masyarakat antara lain :

- A. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);**
- B. Penerbitan Surat Keterangan tanda lapor Partai Politik (Parpol);**
- C. Penerbitan Rekomendasi Riset / Penelitian.**

Dalam pengembangan pendidikan politik masyarakat, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Siak selama 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Siak menyadari betapa pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. pendidikan politik adalah suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi di negara kita untuk menyadarkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan di setiap aspek kehidupan masyarakat dan desa. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan politik kepada masyarakat maupun kepada partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan PEMILU dan PILKADA.



### 2.3.1 Sub Bagian Tata Usaha

Gambaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Evaluasi dan Capaian Kinerja Pada Sub Bagian Tata Usaha**

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penyusunan Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Penyusunan Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Penyusunan LKP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5.	Penyusunan Anggaran Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
6.	Pelaksanaan Urusan Administrasi Kepagawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.	Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Urusan Rumah Tangga dan Peralatan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Infentarisasi Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

### 2.3.2 Seksi Kewaspadaan Daerah

Gambaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Seksi Kewaspadaan Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel II.8**  
**Evaluasi dan Capaian Kinerja Pada Seksi Kewaspadaan Daerah**

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyamanan Lingkungan (Operasional FKDM)	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang
2.	Pengendali kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	0	60 Orang	60 Orang	0	0
3.	Pengendalian keamanan lingkungan	0	0	0	131 Orang	0
4.	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang
5.	Operasionalisasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

### 2.3.3 Seksi Kesatuan Bangsa

Gambaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Seksi Kesatuan Bangsa selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel II.9**  
**Evaluasi dan Capaian Kinerja Pada Seksi Kesatuan Bangsa**

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0	0
2.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0	0
3.	Sosialisasi empat pilar kebangsaan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0
4.	Pelatihan dasar Bela Negara	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0
5.	Sosialisasi Nilai Kebangsaan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0	0
6.	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian halaqoh dan berbagai dforum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

#### 2.3.4 Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik

Gambaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel II.10**  
**Evaluasi dan Capaian Kinerja Pada Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik**

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penyuluhan Kepada masyarakat	0	0	100 Orang	100 Orang	0
2.	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
3.	Fasilitasi Penyaluran Bantuan keuangan partai politik	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

#### 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

##### A. Tantangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak tidak lepas dari peluang dan tantangan yang dihadapi ketika realisasi program dan kegiatan. Tantangan akan diidentifikasi guna mendapat alternatif solusi yang sesuai sedangkan peluang akan memperkuat posisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

##### 2.4.1 Seksi Kesatuan Bangsa

- a. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila;
- b. Mengemukanya pluralnya masyarakat Kabupaten Siak dari konfigurasi etnik dan agama berpotensi munculnya konflik antar suku bangsa;

- c. Adanya kecenderungan menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme warga masyarakat;
- d. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam merealisasikan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak;
- e. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam merealisasikan mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan pribadi.

**Tabel II.11**  
**Data Konflik Sara**

NO	PERMASALAHAN	TAHUN						KET
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pembangunan gereja HKBP di Desa Tumang	1						
2	Penolakan Perluasan gereja HKBP di Dusun Suak Damai Desa Tualang		1					
3	Penolakan pembangunan gereja GPI di Desa Sawit Permai Desa Dayun			2				
4	Pembangunan gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib					1		
5	Penolakan rencana pembangunan gereja HKBP di lingkungan Sukasari Kwalian Kel.Kampung Rempak Kec.Siak				1			

6	Indikasi pembangunan rumah ibadah yang akan digunakan untuk pelaksanaan ibadah Kristen Protestan di Kec. Sungai Apit						1	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

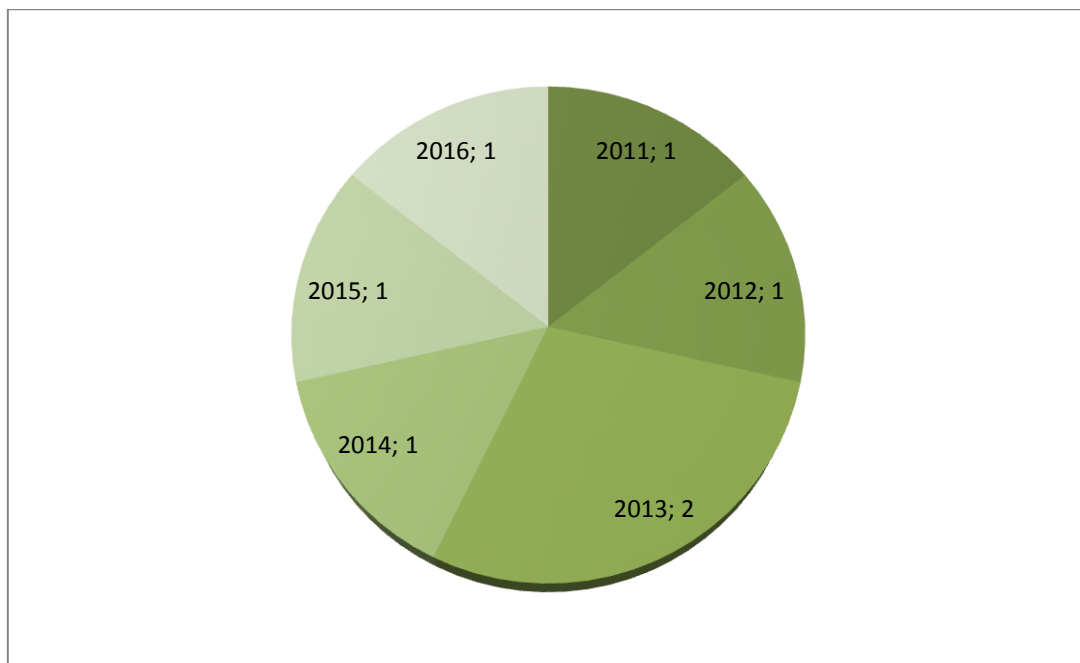


Diagram Konflik Sara

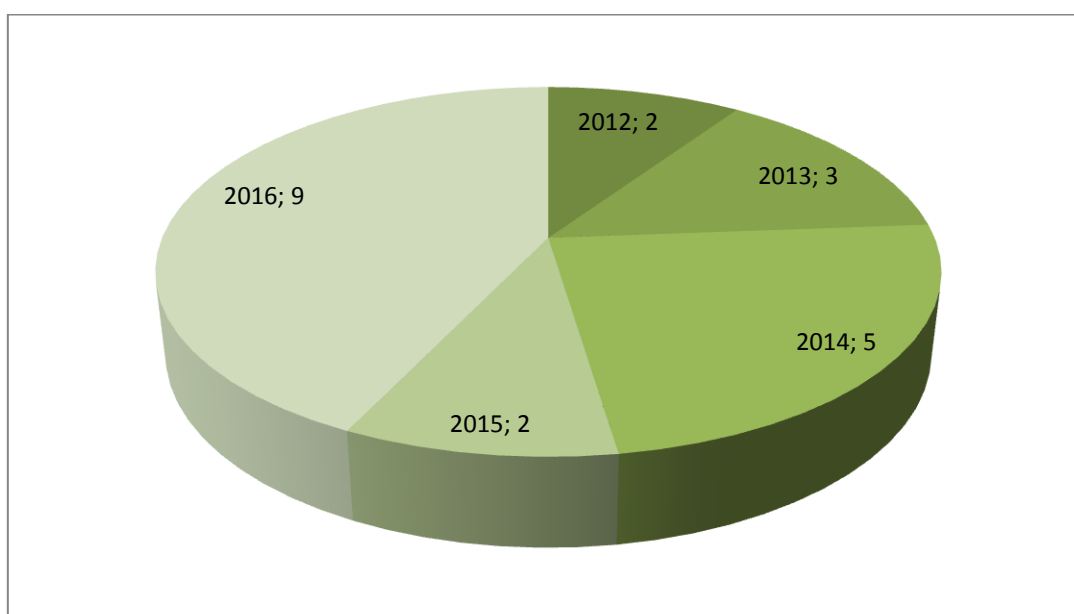
#### 2.4.2 Seksi Kewaspadaan Daerah

- Belum adanya standart pelaksanaan tugas intelijen;
- Belum semua sumber daya manusia mengikuti pendidikan intelijen;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan intelijen;
- Banyaknya masalah aksi unjuk rasa;
- Masih rawannya konflik sosial.

**Tabel II.12**  
**Data Konflik Sosial**

NO	PERMASALAHAN	TAHUN					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Konflik tapal batas/lahan	1	1	1		1	
2	Konflik tenaga kerja	1	2	4	2	7	Permasalahan 3 kampung (Benteng Hulu, hilir, dan Paluh)
3	Permasalahan PLN					1	
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

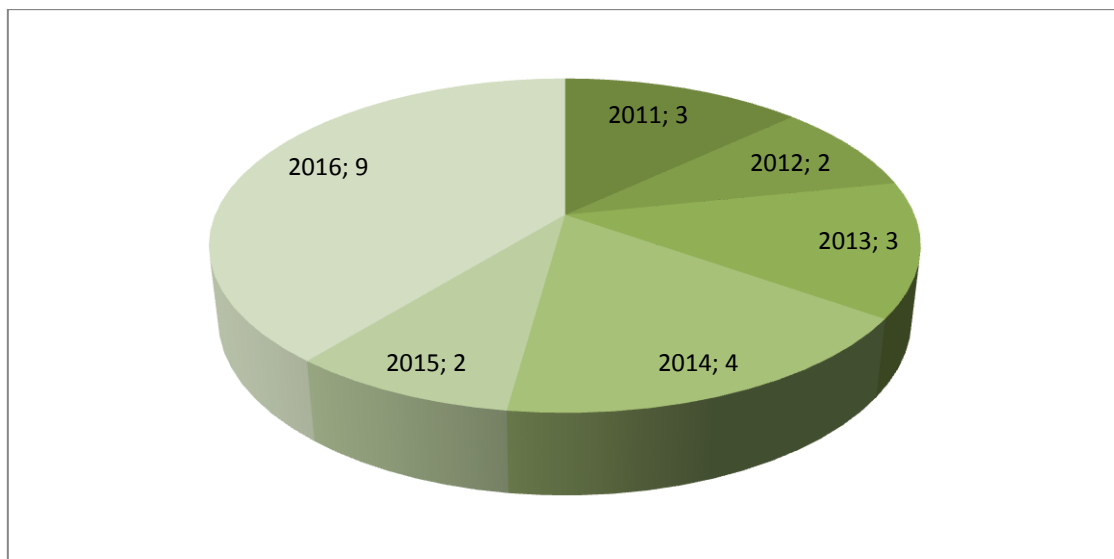


*Diagram Konflik Sosial*

**Tabel II.13**  
**Data Unjuk Rasa di Kabupaten Siak**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2011	3
2	2012	2
3	2013	3
4	2014	4
5	2015	2
6	2016	9

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*



*Diagram Unjuk Rasa*



### 2.4.3 Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik

- Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga politik, dan lembaga masyarakat;
- Kurang pemahaman masyarakat tentang politik;
- Kurangnya anggaran penunjang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada.

**Tabel II.14**  
**Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah**

NO	URAIAN	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Musrenbang Kecamatan	70 %	72 %	75 %	80 %	78 %	80 %

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

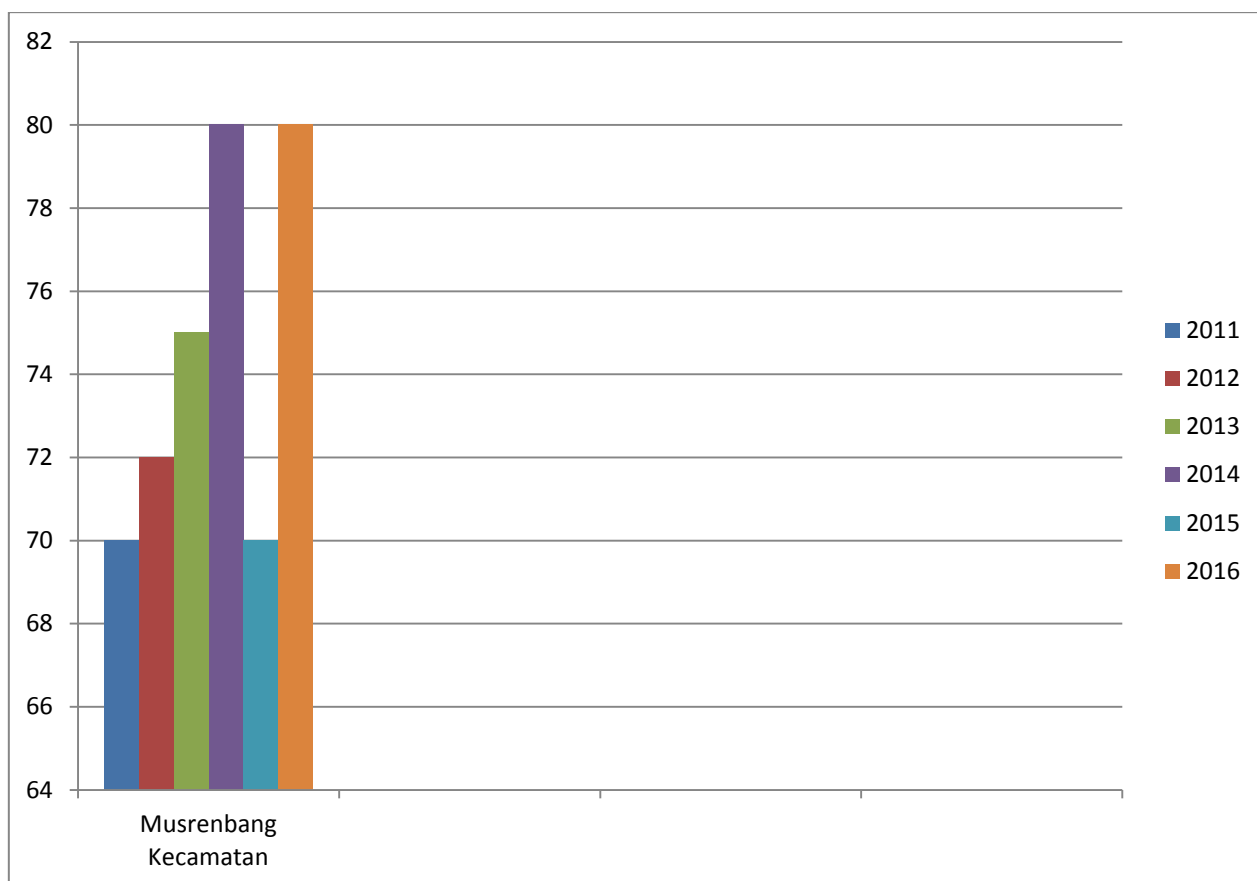


Diagram Persentase Partisipasi Masyarakat

**Tabel II.15**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu dan Pemilukada**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemilihan Gubernur			48,93%		
2	Pemilihan Bupati					59,86%
3	Pemilihan Legislatif				70,10%	
4	Pemilihan Presiden				64,35%	

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan melihat tabel data partisipasi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur tahun 2013 yang menggunakan hak pilihnya pada putaran ke kedua sebesar 48,12% dan pada pemilu Legislatif ditahun 2014 yang menggunakan hak pilihnya tahun 2014 sebesar 70,10% terjadi kenaikan yang signifikan berkisar 22% dengan kata lain jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya semakin meningkat, dengan makna pendidikan politik dalam masyarakat yang disosialisasikan Oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berpengaruh dikalangan masyarakat secara umum. Hal ini berdampak positif bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan visi dan misi tapisungguh ironis pada pemilihan presiden ditahun yang sama tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya menurun menjadi 64,35% terjadi penurunan berkisar 6%. Hal ini berdampak tidak baik bagi roda pemerintah serta adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada presiden yang akan dipilihnya.

## **B. Peluang**

- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak bisa bertindak sebagai fasilitasi antara pemerintah dengan lembaga legislative;
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak bisa bertindak sebagai fasilitasi antara pemerintah dengan partai politik;
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak bisa bertindak sebagai fasilitasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat;

- d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak bisa bertindak sebagai fasilitasi antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat;
- e. Adanya rapat koordinasi lintas sector yang dilaksanakan secara rutin sehingga adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dapat terdeteksi secara dini;
- f. Adanya FKDM membantu stabilitas keamanan dan ketentraman daerah;
- g. Meningkatnya rasa cinta tanah air terhadap pemuda di Kabupaten Siak.

**Tabel II. 16**  
**Arah Pengembangan Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	BIDANG/SEKSI	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	ARAH PENGEMBANGAN KEDEPAN	KET
1.	Tata Usaha	1. Penyusunan Renstra 2. Penyusunan Renja 3. Penyusunan LKP 4. Penyusunan Laporan Keuangan 5. Penyusunan Anggaran Kegiatan 6. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kepagawaian 7. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat 8. Urusan Rumah Tangga dan Peralatan Kantor 9. Infentarisasi Barang	1. Penyusunan Renstra 2. Penyusunan Renja per Kasi 3. Penyusunan LKP disetiap tahun berjalan 4. Penyusunan Laporan Keuangan berjalan setiap tahun 5. Pengelolaan Keuangan yang meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan 6. Pelaksanaan urusan administrasi dan kepangkatan pegawai 7. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan tata kearsipan 8. Urusan Rumah Tangga dan Peralatan Kantor 9. Inventarisasi Barang	

2.	Kasi Kesatuan Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat</li> <li>2. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa</li> <li>3. Sosialisasi Nilai Kebangsaan</li> <li>4. Pelatihan Dasar Bela Negara</li> <li>5. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</li> <li>6. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)</li> <li>7. Peringatan Upacara Hari Bela Negara</li> <li>8. Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda di Kabupaten Siak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan</li> <li>2. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan</li> <li>3. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan</li> <li>4. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan</li> <li>5. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan</li> <li>6. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan</li> <li>7. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan</li> <li>8. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan</li> </ol>	
----	----------------------	--	--	--

3.	Kasi Kewaspadaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>2. Pelatihan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah</li> <li>3. Bimtek Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap Gangguan Konflik Bagi Aparatur dan Masyarakat</li> <li>4. Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah</li> <li>5. Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan keamanan</li> <li>6. Pelatihan Pencegahan Unjuk Rasa dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>4. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>5. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>6. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> </ol>	
4.	Kasi Fasilitasi Infrastruktur Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Politik Kepada Masyarakat</li> <li>2. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik</li> <li>3. Fasilitasi Penyaluran Bantuan keuangan partai politik</li> <li>4. Bimtek dan Mekanisme Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik</li> <li>2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik</li> <li>3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik</li> <li>4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik</li> </ol>	

		5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ORMAS kepada Masyarakat  6. Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	5. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik  6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	
--	--	--	--	--

*Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*



## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Berikut ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya:

##### **A. Seksi Kesatuan Bangsa**

- a. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila;
- b. Adanya kecenderungan menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme warga masyarakat;
- c. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam merealisasikan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
- d. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam merealisasikan mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan pribadi.

##### **B. Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik**

- a. Adanya informasi lisan tentang ormas dan LSM yang aktifitasnya meresahkan masyarakat;
- b. Masih adanya ormas dan LSM yang meresahkan masyarakat tetapi tidak memberitahukan keberadaannya;
- c. Adanya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), namun tidak dikeluarkan karena menggunakan lambang negara sebagai lambang organisasinya;
- d. Masih ada Partai Politik yang beralamat sekretariat di luar Siak Sri Indrapura, sehingga menyulitkan koordinasi Pemerintah dengan parpol;
- e. Kurangnya anggaran penunjang dalam melaksanakan kegiatan dan program yang ada.

##### **C. Seksi Kewaspadaan Daerah**

- a. Belum adanya standart pelaksanaan tugas intelijen;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan intelijen;
- c. Masih adanya masalah aksi unjuk rasa;



- d. Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam antisipasi dan mengatasi kerawanan keamanan, ketentramanan, dan ketertiban masyarakat berpotensi menimbulkan ketidak setabilan kamtrantibmas.
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya gerakan dari kelompok masyarakat tertentu yang bisa meresahkan dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, misalnya adanya kelompok pengajian yang cenderung menyalahkan mayoritas umat Islam lainnya;

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak periode 2016 – 2021 telah menyusun visi dan misi Kabupaten Siak untuk meningkatkan pembangunan Kabupaten Siak.

**Visi :**

***“Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadi Kabupaten Siak sebagai tujuan **pariwisata di Sumatera**”***

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di wilayah Kabupaten Siak;
2. Kabupaten Siak yang **Maju**, ditandai dengan tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi;
3. Kabupaten Siak yang **Sejahtera** ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam pendapatan per kapita; angka kemiskinan dan indeks pemenuhan kebutuhan dasar;

4. **Masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu**, ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, perwujudan masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilai-nilai keislaman (sebagai agama mayoritas) dalam kehidupan kemasyarakatan dan sebagai landasan spiritual pembangunan daerah serta dengan mewujudkan budaya Melayu sebagai sarana kultural kehidupan kemasyarakata;
5. **Kabupaten Siak sebagai tujuan pariwisata di Sumatera** ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Siak sehingga mengimbangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata utama di pulau Sumatera.

**Misi :**

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa serta berbudaya melayu;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama dikampung-kampung serta Menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-Sektor produktif Lainnya;
4. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan yang publik yang prima.

### 3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN DALAM NEGERI

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun kedepan. Visi ini nantinya secara otomatis berhubungan terhadap pemerintah daerah yang dinaungi Kementerian Dalam Negeri. Visi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri adalah

***“Terwujudnya system politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumberdaya aparatur professional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

Untuk mendukung visi tersebut Kementerian Dalam Negeri menetapkan misi yang merupakan peran strategic dalam mencapai visi tersebut. Misi ini juga disusun berdasarkan isu-isu strategis di lingkup Kementerian Dalam Negeri, misi tersebut adalah:

1. Memperkuat keutuhan NKRI; serta memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah desentralistik
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat – daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social, dan budaya; serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun untuk mencapai misi tersebut tujuan sasaran yang telah ditentukan Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan langsung dengan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi;
- b. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

#### 1.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

- a. Kurang optimalnya komunikasi antar anggota dan dewan pembina FKUB dan FPK;
- b. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila;
- c. Mengemukanya pluralnya masyarakat Kabupaten Siak dari konfigurasi etnik dan agama berpotensi munculnya konflik antar suku bangsa;
- d. Adanya kecenderungan menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme warga masyarakat;
- e. Belum adanya standart pelaksanaan tugas intelijen;
- f. Belum semua sumber daya manusia mengikuti pendidikan intelijen;
- g. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan intelijen;
- h. Banyaknya masalah aksi unjuk rasa;
- i. Masih rawannya konflik sosial;
- j. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga politik, dan lembaga masyarakat;
- k. Kurang pemahaman masyarakat tentang politik;
- l. Kurangnya anggaran penunjang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada.

Berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsi:

1. Teroris dan kelompok radikal yang bisa mengganggu, membahayakan dan mengancam stabilitas trantibmas dalam masyarakat.;
2. Kemajemukan masyarakat Kabupaten Siak dari konfigurasi agama, suku bangsa tetap diperkirakan sebagai potensi konflik pada masa yang akan datang, sehingga perlu tindakan preventif untuk menciptakan harmonisasi dan kerukunan umat bergama dan suku bangsa;
3. Masih adanya timpang tindih antara lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan akan menimbulkan potensi permasalahan pada masa yang akan datang;
4. Kurangnya sosialisasi empat kosensus yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa mengakibatkan krisis dan

dekadensi moral anak bangsa terutama generasi muda yang semakin kehilangan jati diri sebagai bahagian terintegrasi bangsa dan negara.

Suatu upaya dalam melaksanakan pencegahan potensi konflik dan peningkatan pencegahan (hak sipil dan hak politik) sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang

- a) Mengantisipasi sejak dini potensi-potensi konflik berupa kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/perlakuan, kebijakan);
- b) Meningkatkan sikap nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesadaran bela negara dikalangan masyarakat;
- c) Meningkatkan ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan;
- d) Memberdayakan dan memperkuat peran lembaga-lembaga non pemerintah (LSM/Orkemas, FPK, FKUB dan FKDM untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah;
- e) Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dan meningkatnya kualitas kehidupan politik dengan semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan hak politik dan hak sipilnya;
- f) Terdeteksinya kondisi-kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/prilaku, kebijakan) guna meminimalisasi konflik sosial dalam mewujudkan pemantapan kewaspadaan dalam mencapai ketertiban masyarakat;
- g) Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, sikap nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran bela negara dikalangan masyarakat.

### **3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Besarnya tugas dan fungsi yang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak mengharuskannya untuk memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dalam pengelolaan program dan kegiatan.

Isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak antara lain:

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal pendidikan politik serta wawasan kebangsaan;
- b. Lemahnya peran intelijen dalam Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak;
- c. Munculnya kekuatan kelompok masyarakat tertentu yang mengorganisir diri mereka kedalam wadah ormas dan gerakan LSM yang memerankan fungsi pemerintah dan negara, misalnya fungsi pengawasan, audit, pemeriksaan dan lain-lain terhadap lembaga pemerintah.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. VISI DAN MISI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

##### MISI RPJPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2005 – 2025

1. Mewujudkan kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu di Indonesia melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosiasl budaya;
2. Mengembangkan sektor – sektor ekonomi daerah berlandaskan potensi local;
3. Membina sektor agribisnis, agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan;
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, bersih,berwibawa, dan mejunjung tinggi norma adat, agama dan hokum;
5. Menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
6. Memenuhi Kebutuhan dasar dan hak sosial – politik masyarakat.;
7. Meningkatkan kualitas masyarakat yang agamis dan berbudaya.

##### MISI RPJMD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 – 2021

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Beriman Dan Bertaqwa Serta Berbudaya Melayu;
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan.;
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Dan Berdaya Saing.;
4. Mewujudkan Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing.;
5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Prima Serta Mewujudkan Demokrasi Tingkat Lokal.

Sedangkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak dalam perannya mendukung pencapaian Visi Kabupaten Siak, mengambil bagian dalam Misi ke lima (5) yaitu:

***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan pelayanan publik yang prima serta mewujudkan demokrasi tingkat lokal”***

Untuk menunjang misi ke lima (5) Kabupaten Siak, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki sasaran sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;**
2. **Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;**
3. **Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan;**
4. **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik.**

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Tujuan :**

Mewujudkan Stabilitas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Siak

**Sasaran :**

- A. Meningkatkan Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- B. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- C. Meningkatkan Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan;
- D. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak disajikan sebagai berikut :



**Tabel IV. I**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Stabilitas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Siak	Jumlah Konflik							0
			Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (Baik)	B (Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)
				Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	B	B	BB	BB	A
2			Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Konflik Sosial	9	8	7	6	5
3			Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Sara	0	0	0	0	0
4			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah	74%	75%	76%	78%	80%

Sumber : Kantor Kesbang dan politik

#### **4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

##### **A. Strategi**

1. Melaksanakan penyuluhan, pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat tentang perlunya menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat yang harmonis, partisipatif dan saling hormat-menghormati antar suku bangsa dan umat beragama serta soshal dan trantibmas;
2. Menciptakan hubungan kemitraan yang sinergis antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik;
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU Bidang Politik dalam rangka peningkatan pengetahuan politik msyarakat;

## **B. Kebijakan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak menerapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menciptakan hubungan yang komunikatif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh Pemuda dan lain-lain dalam rangka penciptaan stabilitas sospol dan trantibmas;
2. Mendata ulang menertibkan Ormas dan LSM dengan cara memberlakukan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, agar ormas dan LSM mendaftarkan keberadaannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
3. Melaksanakan monitoring terhadap situasi kerawanan sospol dan trantibmas masyarakat dalam wilayah Kabupaten Siak;
4. Mengoptimalkan pelatihan sospol dan trantibmas kepada aparatur pemerintah bagi instansi terkait;
5. Menciptakan hubungan/relasi lintas sektoral dengan instansi terkait secara sinergis dengan instansi yang mempunyai hubungan tugas pokok dan fungsi dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan jangka menengah selama lima tahun (2016-2021) yang disusun oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak tetap mengacu kepada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2016-2021. Selain itu juga mengacu kepada tugas pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.

Selain rencana program dan kegiatan jangka menengah selama lima tahun (2016-2021) ini disusun pula berdasar kondisi objektif yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, baik keadaan situasi kondisi permasalahan sospol dan trantibmas pada masa lalu, maupun proyeksi situasi kondisi permasalahan sospol dan trantibmas pada masa yang akan datang.

#### **A. Program**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan.

#### **B. Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

#### **C. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian satu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan diteapkan dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak pada Tahun 2016 – 2021 terdapat 8 (delapan) program. Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak pada Tahun 2017 – 2021 terdapat 56 (lima puluh enam kegiatan) kegiatan. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik;
  - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
  - h) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan;
  - i) Penyediaan Jasa Makan Dan Minum;
  - j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah;
  - k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
  - l) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor;
  - m) Kunjungan kerja dan peninjauan lapangan dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - a) Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional;
  - b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - c) Pengadaan Mebeleur;

- d) Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya;
  - e) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas;
  - f) Pemeliharaan rutin/Peralatan Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
  - b) Pengadaan Pakaian KORPRI;
  - c) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
  - d) Pengadaan Pakaian Kedaerahan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- a) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
  - b) Penyusunan Laporan LAKIP;
  - c) Penyusunan Renstra.
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- a) Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- a) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyamanan Lingkungan;
  - b) Pelatihan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah;
  - c) Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah;
  - d) Bimtek Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap Gangguan Konflik Bagi Aparatur dan Masyarakat;
  - e) Operasional Tim terpadu penanganan gangguan keamanan;
  - f) Pelatihan Pencegahan Unjuk Rasa dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- a) Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan MasyarakatPeningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai- Nilai Luhur Budaya Bangsa;
  - b) Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai- Nilai Luhur Budaya BangsaPelatihan Dasar Bela Negara;

- c) Sosialisasi Nilai Kebangsaan;
  - d) Pelatihan Dasar Bela Negara;
  - e) Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
  - f) Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
  - g) Peringatan Upacara Hari Bela Negara;
  - h) Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda di Kabupaten Siak
- Program Pendidikan Politik Masyarakat;
8. Program Penyuluhan Kepada Masyarakat;
- a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Politik Kepada Masyarakat;
  - b) Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik;
  - c) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - d) Bimtek dan Mekanisme Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - e) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ORMAS Kepada Masyarakat;
  - f) Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu.

**Tabel V. 2**  
**Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak**

NO		PROGRAM/KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1	Penyediaan jasa surat menyurat;
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
	5	Penyediaan alat tulis kantor;
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan;
	9	Penyediaan Jasa Makan Dan Minum;
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
	11	Penyediaan jasa keamanan kantor;
	12	Penyediaan jasa administrasi perkantoran;
	13	Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah;
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
	3	Pengadaan mebeleur;
	4	Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya;

	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
	2	Pengadaan Pakaian KORPRI;
	3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
	4	Pengadaan Pakaian Kedaerahan;
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
	2	Penyusunan Laporan LAKIP;
	3	Penyusunan Renstra;
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	
	1	Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
	1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyamanan Lingkungan ;
	2	Pelatihan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah;
	3	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah;
	4	Bimtek Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap Gangguan Konflik Bagi Aparatur dan Masyarakat;
	5	Operasional Tim terpadu penanganan gangguan keamanan;
	6	Pelatihan Pencegahan Unjuk Rasa dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat;
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
	1	Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat;
	2	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai- Nilai Luhur Budaya Bangsa;
	3	Sosialisasi Nilai Kebangsaan;
	4	Pelatihan Dasar Bela Negara;
	5	Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
	6	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
	7	Peringatan Upacara Hari Bela Negara;
	8	Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda di Kabupaten Siak;
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Politik Kepada Masyarakat;
	2	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik;
	3	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik;
	4	Bimtek dan Mekanisme Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ORMAS kepada Masyarakat;
	6	Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu;





## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Nilai Predikat SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Jumlah Konflik Bernuansa Sara.

**Tabel VI.1**  
**Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Predikat SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	c	B	B	BB	BB	A	A
2	Jumlah Konflik Bernuansa Sara	1	0	0	0	0	0	0

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorif  
Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Siak**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan													
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir PeriodePerencanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mewujudkan Stabilitas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Siak	Jumlah konflik Sosial dan Jumlah Konflik Bernuasa Sara	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat Kepuasan Atas Layanan Administrasi Perkantoran (Skala 1-5)	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100	868.214.600	100	1.070.336.200	100	1.076.120.500	100	1.076.120.500	100	1.076.120.500	100	5.166.912.300	Kantor Kesbang dan Politik	Kabupaten Siak
			Nilai Predikat SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik																		
				01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis dan jumlah prangko, materai dan prangko surat	2 Jenis	2	2.250.000	2	2.250.000	2	2.250.000	2	2.250.000	2	2.250.000	2	13.500.000		
				01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 Jenis	3	57.600.000	3	81.600.000	3	81.600.000	3	81.600.000	3	81.600.000	3	465.600.000		
				01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah petugas jasa administrasi keuangan	2 Orang	2	32.400.000	2	43.200.000	2	43.200.000	2	43.200.000	2	43.200.000	2	248.400.000		
				01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 Orang	2	23.300.000	6	29.900.000	6	29.900.000	6	29.900.000	6	29.900.000	6	172.800.000		
				01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan	34 Jenis	34	84.408.200	34	84.408.200	34	90.192.500	34	90.192.500	34	90.192.500	34	529.586.400		
				01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis	7	56.458.400	7	70.880.000	7	70.880.000	7	70.880.000	7	70.880.000	7	410.858.400		
				01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	7 Jenis	7	3.628.000	7	3.628.000	7	3.628.000	7	3.628.000	7	3.628.000	7	21.768.000		
				01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	8 Eksemplar	8	9.300.000	8	9.300.000	8	9.300.000	8	9.300.000	8	9.300.000	8	55.800.000		
				01.17	Penyediaan Jasa Makan Dan Minum	Jumlah pegawai yang disediakan makan dan minum	0 Orang	0	0	17	83.570.000	17	83.570.000	17	83.570.000	17	83.570.000	17	417.850.000		
				01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	85 laporan	85	383.410.000	85	412.840.000	85	412.840.000	85	412.840.000	85	412.840.000	85	2.447.610.000		
				01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	2 Orang	2	28.800.000	2	38.400.000	2	38.400.000	2	38.400.000	2	38.400.000	2	220.800.000		
				01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	5 Orang	5	71.100.000	5	94.800.000	5	94.800.000	5	94.800.000	5	94.800.000	5	545.100.000		

				01.22	Kunjungan kerja dan peninjauan lapangan dalam daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja dan peninjauan lapangan dalam daerah	48 Laporan	48	115.560.000	48	115.560.000	48	115.560.000	48	115.560.000	48	115.560.000	48	693.360.000		
				02.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100	47.550.000	100	160.550.000	100	60.550.000	100	610.550.000	100	60.550.000	100	1.000.300.000	Kantor Kesbang dan Politik	Kabupaten Siak
				02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas (Operasional)	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	1	450.000.000	-	-	1	450.000.000		
				02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Jenis	-	-	2	20.000.000	-	-	2	20.000.000	-	-	4	40.000.000		
				02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mabeleur yang diadakan	0 Jenis	-	-	2	30.000.000	-	-	3	30.000.000	-	-	5	60.000.000		
				02.11	Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya	Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapan yang diadakan	0 Jenis	-	-	3	50.000.000	-	-	3	50.000.000	-	-	6	100.000.000		
				02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin berkala	2 Unit	2	36.600.000	2	49.600.000	2	49.600.000	2	49.600.000	2	49.600.000	2	284.600.000		
				02.30	Pemeliharaan rutin/Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara /rutin/berkala	5 Jenis	5	10.950.000	5	10.950.000	5	10.950.000	5	10.950.000	5	10.950.000	5	65.700.000		
				03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	100	0	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	136.000.000	Kantor Kesbang dan Politik	Kabupaten Siak
				03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stell	-	-	17	8.500.000	17	8.500.000	17	8.500.000	17	8.500.000	17	34.000.000		
				03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI yang diadakan	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0 Stell	-	-	11	8.500.000	11	8.500.000	11	8.500.000	11	8.500.000	11	34.000.000		
				03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stell	-	-	17	8.500.000	17	8.500.000	17	8.500.000	17	8.500.000	17	34.000.000		
				03.06	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Jumlah pakaian kedaerahan yang diadakan	0 Stell	-	-	17	8.500.000	17	8.500.000	17	8.500.000	17	8.500.000	17	34.000.000		
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0 Dokumen	3	0	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	180.000.000	Kantor Kesbang dan Politik	Kabupaten Siak
				06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	0 Dokumen	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	60.000.000		
				06.05	Penyusunan Laporan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	0 Dokumen	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	60.000.000		
				06.07	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen Renstra	0 Dokumen	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	60.000.000		
				07.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Ketepatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	Kantor Kesbang dan Politik	Kabupaten Siak

				07.01	Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dan jenis jasa perawatan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	0 Kali	-	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	40.000.000		
		Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah konflik Sosial	15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Konflik Sosial	9 Konflik	9	434.702.500	8	445.570.063	7	456.709.314	6	468.127.047	5	479.830.223	5	2.284.939.147	Kantor Kesbang dan Politik	Kabupaten Siak
				15.01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Dewan Penasehat dan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	28 Orang	28	135.400.000	28	135.400.000	28	135.400.000	28	135.400.000	28	135.400.000	28	677.000.000		
				15.04	Pelatihan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0 Orang	60	11.602.500	-	-	60	22.006.814	60	22.006.814	-	-	60	55.616.128		
				15.09	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Jumlah Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	26 Orang	26	154.770.000	26	154.770.000	26	154.770.000	26	154.770.000	26	154.770.000	26	773.850.000		
				15.10	Bimtek Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap Gangguan Konflik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0 Orang	-	-	60	11.602.500	60	11.602.500	60	11.602.500	60	11.602.500	60	46.410.000		
				15.11	Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah anggota Tim Terpadu	45 Orang	45	132.930.000	45	132.930.000	45	132.930.000	45	132.930.000	45	132.930.000	45	664.650.000		
				15.14	Pelatihan Pencegahan Unjuk Rasa dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0 Orang	-	-	60	10.867.563	-	-	60	11.417.733	60	45.127.723	60	67.413.019		
		Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Bernuasa Sara	16.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Bernuasa Sara	1 Konflik	0	183.515.000	0	296.660.000	0	336.560.000	0	378.685.000	0	405.850.000	0	1.601.270.000	Kantor Kesbang dan Politik	Kabupaten Siak
				16.02	Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				16.03	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai- Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				16.09	Sosialisasi Nilai Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				16.10	Pelatihan Dasar Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0 Orang	60	106.515.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.515.000		
				16.	Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Dewan Pembina dan Pengurus FPK	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				16.	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah Tim Pengurus PPWK	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				16.11	Peringatan Upacara Hari Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti upacara	500 Orang	500	77.000.000	500	83.210.000	500	85.210.000	500	88.340.000	500	93.450.000	500	427.210.000		

				16.01	Sosialisasi Pematapan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda di Kabupaten Siak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 Orang	60	-	60	213.450.000	60	251.350.000	60	290.345.000	60	312.400.000	60	1.067.545.000		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah	18.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah	80%	80	156.600.000	85	156.600.000	87	156.600.000	89	156.600.000	90	156.600.000	90	783.000.000	Kantor Kesbang dan Politik	Kabupaten Siak
				18.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Politik Kepada Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				18.03	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 Orang	60	100.100.000	60	100.100.000	60	100.100.000	60	100.100.000	60	100.100.000	60	500.500.000		
				18.05	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah peserta rapat bantuan keuangan partai politik	45 Orang	45	56.500.000	45	56.500.000	45	56.500.000	45	56.500.000	45	56.500.000	45	282.500.000		
				18.	Bimtek dan Mekanisme Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				18.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ORMAS kepada Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				18.	Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Tim Monitoring dan Petugas Sekretariat Pemilu	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH									1.690.582.100		2.218.716.263		2.175.539.814		2.779.082.547		2.267.950.723		12.255.071.447		

Siak Sri Indapura,  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK



SYAFRIZAL, S.Sos  
Pembina TK.I  
NIP. 19691202 1999002 1 001